

ABSTRAK

FITRIANI. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan Di Kabupaten Maros (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Muh. Amril Pratama Putra).

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah Perkotaan di Kabupaten Maros dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Peran pemerintah daerah sebagai regulator dalam hal ini Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup sudah menerapkan peran dan tugasnya dengan baik pemerintah daerah sudah membuat regulasi untuk melakukan pengelolaan sampah di Kabupaten Maros dan sudah melakukan pembangunan demi kelancaran pengelolaan sampah. 2) Peran pemerintah daerah sebagai dinamisator pemerintah juga sudah melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait penyuluhan dan sosialisasi sampah di Kabupaten Maros meskipun masih ada beberapa masyarakat yang belum pernah mendapatkan penyuluhan dari pemerintah tetapi pemerintah akan terus berupaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. 3) Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator tentunya dalam hal ini pemerintah yang menjembatani penyediaan fasilitator untuk pelayanan masyarakat. Pemerintah telah membangun bank sampah dan pemerintah telah menyediakan fasilitas meskipun masih belum cukup serta pemerintah menyediakan anggaran untuk pengelolaan sampah perkotaan yang ada di Kabupaten Maros. 4) Faktor pendukung dalam pengelolaan sampah yaitu dengan adanya Peraturan Daerah No.6 Tahun 2022 dapat mempermudah pemerintah dalam mengelola sampah dan bisa memberikan edukasi juga kepada masyarakat, serta pemerintah telah menyediakan sarana prasarana untuk mempermudah dalam pengelolaan sampah. Ini memang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk penyediaan sarana prasarana. 5) Faktor penghambat pengelolaan sampah yaitu kurangnya sarana prasarana dan tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini tergolong menghambat proses pengelolaan yang akan dilaksanakan.

Kata kunci: Peran pemerintah, pengelolaan sampah, sarana prasarana, partisipasi masyarakat